



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO



EDISI RABU, 28 DESEMBER 2022

RINGKASAN BERITA HARI INI



7 Jabatan Camat Digeser

Sejumlah kecamatan di Kabupaten Sidoarjo mengalami perubahan jabatan Camat. Hal ini dilakukan sebagai bagian dari evaluasi kinerja dan penyesuaian kebutuhan daerah.

Evaluasi Akhir Tahun, Dewan Minta Komisi Tingkatkan Fungsi Pengawasan

KOTA-Menjelang akhir tahun, pimpinan DPRD Sidoarjo mengevaluasi hasil kinerja legislatif tahun ini. Baik dari produk hukum yang dihasilkan, hingga fungsi pengawasan yang dijalankan. Dengan begitu, diharapkan tahun depan akan ada perbaikan. Ketua DPRD Sidoarjo Usman mengatakan, tugas utama legislatif adalah mengawasi kinerja eksekutif. Sehingga dana yang sudah disiapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bisa berjalan sesuai dengan perencanaan. Juga agar pembangunannya berjalan maksimal. Tahun depan, Usman berharap seluruh komisi yang ada di DPRD...



Komisi C Minta Dinkes Kembali ke Tupoksinya

Baznas Bantu Biaya Hidup 327 Warga Kurang Mampu

Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Sidoarjo telah menyerahkan bantuan biaya hidup kepada 327 warga kurang mampu. Bantuan ini merupakan salah satu bentuk kepedulian Baznas dalam membantu masyarakat yang membutuhkan.

Unipa Ajak Warga Jatikalang Kelola Bank Sampah

Universitas PGRI Adi Darma (Unipa) Sidoarjo mengajak warga Desa Jatikalang untuk mengelola bank sampah. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan sampah yang baik.

Men PAN-RB: Pensiun Dini Tak Ada di Revisi UU ASN

Menyikapi berbagai informasi yang beredar, Menteri PAN-RB menyatakan bahwa pensiun dini tidak akan dimasukkan dalam revisi Undang-Undang ASN. Kebijakan ini didasarkan pada pertimbangan yang matang untuk menjaga kesejahteraan pegawai negeri sipil.

Jembatan Desa Kraton Akhirnya Tersambung

Proyek pembangunan jembatan di Desa Kraton Kabupaten Sidoarjo telah selesai. Jembatan ini akan sangat bermanfaat bagi masyarakat setempat dalam meningkatkan akses transportasi.

Praktik Pungli Marak, LSM Satria Minta Warga Tak Takut Laporkan Polisi

Organisasi Masyarakat Satria (MSA) mengkritik maraknya praktik pungli di Kabupaten Sidoarjo. Mereka meminta masyarakat untuk berani melaporkan pelanggaran tersebut kepada pihak berwajib.



Setiap Bulan 10 Orang Ajukan Pembatalan Haji di Kemenag

KOTA-Jamaah yang membatalkan haji tahun ini cukup banyak. Menurut data dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo, setiap bulan ada 10 orang yang mengajukan pembatalan haji.



Perlu Ciptakan Iklim Kondusif Hubungan Perusahaan dan Pekerja

KOTA-Demi mewujudkan kesejahteraan tenaga kerja yang ada di Sidoarjo, perlu diciptakan iklim kondusif dalam hubungan antara perusahaan dan pekerja. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan komunikasi dan transparansi.

Sidoarjo, setiap bulan ada 10 orang yang mengajukan pembatalan. Kemenag pun gar jamaah tidak tergesa-gesa pembatalan porsinya. Menurut data dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo, setiap bulan ada 10 orang yang mengajukan pembatalan haji. Kemenag pun gar jamaah tidak tergesa-gesa pembatalan porsinya. Menurut data dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo, setiap bulan ada 10 orang yang mengajukan pembatalan haji. Kemenag pun gar jamaah tidak tergesa-gesa pembatalan porsinya.



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Komisi C Minta Dinkes Kembali ke Tupoksinya



SIDOARJO, 27 Desember: Dinkes Sidoarjo sebaiknya fokus melayani kesehatan masyarakat. Tidak perlu repot-repot mengerjakan proyek fisik seperti membangun Puskesmas, pemeliharaan bangunan.

Anggota Komisi C DPRD Sidoarjo, Hamzah Purwandoyo, dalam hearing dengan Dinkes Selasa (27/12) tadi, meminta agar Dinkes kembali pada tupoksinya melayani kesehatan masyarakat. Meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat, pengadaan alkes dan obat-obatan dan Komisi C akan memberikan rekomendasi kepada Dinkes.

Untuk pekerjaan proyek bangunan butuh ilmu teknik sipil, tidak bisa fisik dilihat kasat mata tetapi juga infrastruktur bangunan itu harus sesuai kaidah rumah sakit.

Hasil sebuah pekerjaan proyek bukan dari keahlian kontraktor tapi dari pengawasnya. Kalau pengawasnya ahli maka hasil pekerjaan proyek dipastikan baik. Tapi kalau konsultan pengawasnya tidak ahli, proyeknya pasti babak belur.

“Saya pernah sidak, konsultan pengawas tidak bisa membaca gambar. Benar ini konsultannya tidak bisa membaca gambar proyek.” Ucapnya.

Anggota FKB ini menyarankan urusan proyek fisik sebaiknya diserahkan ke Dinas Perkim Sidoarjo. “Biarkan Perkim yang bekerja sesuai tupoksinya.” Katanya.

Namun kadinkes, Feni Apridawati, meyakinkan bahwa pihaknya dapat menyelesaikan tugas dan tanggungjawab menyelesaikan proyek pembangunan fisik. Saya sering ke lapangan kordinasi dengan konsultan dan kontraktor, ia tegaskan tidak ada serupiahpun ke luar dari kontraktor untuk dinas. Ia menekankan yang paling penting proyeknya baik (cak)

⇒ **CakraJatim.com**



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Evaluasi Akhir Tahun, Dewan Minta Komisi Tingkatkan Fungsi Pengawasan



Usman

IST

KOTA-Menjelang akhir tahun, pimpinan DPRD Sidoarjo mengevaluasi hasil kinerja legislatif tahun ini. Baik dari produk hukum yang dihasilkan, hingga fungsi pengawasan yang dijalankan. Dengan begitu, diharapkan tahun depan akan ada perbaikan.

Ketua DPRD Sidoarjo Usman mengatakan, tugas utama legislatif adalah mengawasi kinerja eksekutif. Sehingga dana yang sudah disiapkan dalam Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bisa berjalan sesuai dengan perencanaan. Juga agar pembangunan berjalan maksimal.

Tahun depan, Usman berharap seluruh komisi yang ada di DPRD Sidoarjo bisa menjalankan fungsi

● Ke Halaman 10



Evaluasi Akhir Tahun,...

pengawasan secara maksimal. Caranya dengan menggali data dan fakta yang ada di lapangan. "Tidak hanya sekedar menegur, tapi memang ada data dan fakta yang tidak sesuai dengan perencanaan," ujarnya.

Pihaknya juga mendorong komisi untuk menjalin komunikasi yang baik dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) rekanannya. Dengan begitu, baik eksekutif dan legislatif bisa menjalankan tugasnya dengan baik.

Di sisi lain, Usman mengakui bahwa

tahun ini kinerja DPRD Sidoarjo dalam membentuk produk hukum belum maksimal. Hingga akhir tahun, raperda yang sudah selesai dibahas mencapai 80 persen dari target.

Menurut dia, memang ada sejumlah kendala dalam penyelesaian raperda. Salah satunya adalah belum ter-

penuhi syarat pembahasan raperda. Seperti dokumen atau naskah akademik yang kurang. Bahkan ada juga raperda yang sudah dibahas namun tidak bisa tuntas tahun ini. "Perlu pembahasan lebih dalam, sehingga membutuhkan perpanjangan waktu," imbuhnya. (nis/vga)





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo dan Direktur Pelayanan PDAM Jadi Pembina KNPI Kab. Sidoarjo

1 min read

11 jam ago bidik



Acara Ta' aruf Pengurus DPD KNPI Sidoarjo (Foto.dok: yah)

SIDOARJO, BIDIKNASIONAL.com – Dalam acara Ta' aruf Pengurus DPD KNPI Sidoarjo, Ketua dan Pengurus DPD (Dewan Pengurus Daerah) KNPI (Komite Nasional Pemuda Indonesia) Kabupaten Sidoarjo memperkenalkan diri kepada ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo H. Usman, M.kes.

Acara digelar pada hari selasa 27/12 pukul 11.00 wib di gedung DPRD kabupaten Sidoarjo.

Ketua KNPI Kabupaten Sidoarjo periode tahun 2022 – 2025, Amrul Haq zein dalam pidatonya mengatakan sebagai pemuda KNPI beserta semua pengurus berjanji akan membantu pelaksanaan pembangunan di kabupaten Sidoarjo.

Ketua DPRD kabupaten sidoarjo abah Usman panggilan akrab dari partai PKB ini mengatakan siap sebagai pembina DPD KNPI kabupaten sidoarjo yang nantinya berharap agar KNPI sebagai pemuda bisa bekerja bareng membangun sidoarjo.

Begitu juga direktur pelayanan PDAM Delta Tirta H. Ftihul Faizun juga mengatakan hal yang sama.

Dirinya menambahkan, agar nanti semoga pengurus KNPI dan anggotanya berjalan sesuai bidangnya masing – masing untuk membantu pemkab membangun Sidoarjo.

Untuk diketahui, selain abah Usman dan abah Faizun sebagai pembina ada juga abah Kasmuin dari LSM cepad.

Laporan: yah

Editor: Budi Santoso





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Home > Pemerintahan

Tok! Raperda Pengelolaan Keuangan Daerah Disahkan, Sejumlah Fraksi DPRD Sidoarjo Beri Catatan

Selasa, 27 Desember 2022 | 15:44



KOTA, [SIDOARJONEWS.id](https://www.sidoarjonews.id) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo bersama dengan DPRD Sidoarjo telah mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pengelolaan Keuangan Daerah menjadi Peraturan Daerah (Perda). Pengambilan Keputusan dan Penandatanganan Perda tersebut dilakukan dalam Rapat Paripurna di Kantor DPRD Sidoarjo, Senin, (26/12/2022) siang.

Dalam pengesahan itu, DPRD Sidoarjo memberikan beberapa catatan dan rekomendasi dalam berjalannya Perda tersebut ke depan. Beberapa catatan dan rekomendasi itu disampaikan oleh Bambang Pujiyanto selaku juru bicara (Jubir) Pandangan Akhir fraksi-fraksi DPRD Sidoarjo.

“Secara garis besar dari sisi administrasi anggaran daerah, dalam dokumen Raperda ini tidak ada yang bertentangan dengan norma-norma hukum yang lebih tinggi,” kata Bambang saat dikonfirmasi usai pagelaran Paripurna itu,” Senin (26/12/2022).

iNewsSidoarjo.id



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Hanya saja, Bambang melanjutkan, fraksi meminta ada penjelasan perihal terobosan baru apa yang ada dalam Raperda tersebut. Sebab, dia menilai, poin-poin yang ada dalam Raperda itu masih belum spesifik mengarah ke hal-hal inovatif dalam pengelolaan keuangan daerah.

"Ini merupakan kekhasan Kabupaten Sidoarjo. Atau Raperda ini hanya untuk mutatis mutandis saja memenuhi perintah UU? Jika ada yang inovatif dipasal berapa dan bagian mana?," ucap politisi dari partai Gerindra itu.

Lebih jauh, pria yang menjabat sebagai ketua Komisi B DPRD Sidoarjo itu menyampaikan, DPRD juga merekomendasikan agar ada pengaturan dalam perda yang lebih rinci untuk memenuhi informasi keuangan daerah dalam web Pemkab yang lengkap dan update.

"Perlu pengaturan yang lebih jelas agar DPRD dapat mengontrol kualitas RKPD. Kami juga minta agar seluruh dokumen baik itu Perda ataupun non Raperda ada *softcopy*-nya. diperlukan juga ada pengaturan yang komprehensif untuk tujuan peningkatan serapan anggaran setiap tahun. Substansi UU nomor 1 tahun 2022 tentang HKPD hendaknya menjadi salah satu dasar penyusunan Raperda pengelolaan keuangan Kabupaten Sidoarjo," ujarnya. (Dimas)

iNewsSidoarjo.id

Komisi C Diremehkan Dinkes Sidoarjo

by cakrajatim — 27 Desember 2022



Sidoarjo – 27 Desember: Suasana hearing komisi C berlangsung dalam suasana tegang akibat Dinkes datang tidak siap data mutakhir proyek yang diupload di aplikasi E-kenda.

Komisi C sudah siap bahan dari progres proyek yang dikerjakan Dinkes namun Dinkes hanya membawa progres data dari lapangan. Yang ternyata berbeda jauh data progres proyek yang dimiliki komisi C dengan Dinkes.

Anggota Komisi C, Musauwimin, mengungkapkan di dalam hearing, Selasa (27/12) siang, bahwa komisi C merasa diremehkan Dinkes Sidoarjo. "Dinkes datang ke rapat tanpa siap data," ucapnya dengan nada geram.

Datang di hearing sudah terlambat padahal komisi



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Datang di hearing sudah terlambat padahal komisi C sudah lama menunggu, dan datanya tidak siap. Dari perbedaan data komisi C dan Dinkes, Musauwimin menilai telah diremehkan. Mestinya Dinkes proaktif mengupdate data ke aplikasi E Kenda. Dalam data itu menurut Dinkes, proyek Puskesmas Urang Agung sudah 99% selesai.

Sementara data komisi C, urang Agung baru selesai 78%. Selisih angka yang jauh sungguh menjengkelkan komisi C merasa dibodohi akibat tidak siapnya data E Kenda.

Menurut wakil ketua komisi C, Anang Iswandono, untung saja data komisi C belum dirilis ke media. Kalau terlanjur dirilis bisa terlihat kebodohan komisi C. Ia mendapatkan data E-kenda yang uploadnya kadaluarsa.

Kadinkes, Feny Apridawati, merasa tidak pernah meremehkan komisi. Dia datang terlambat karena ada pertemuan dengan PJ Sekkab, Puskesmas dan Dinkes. "Sungguh saya minta maaf jika datang terlambat," Terangnya.

Pada Desember ini ia mengaku fokus mengawasi proyek Dinkes dan bahkan untuk Puskesmas Urang Agung sudah di sidak 4 kali. "Saya datang tanpa memberitahu. Dan di situ saya tegaskan pada pengawasnya agar proyek tepat waktu dan hasilnya baik," Ucapnya. (cak)

➡ **CakraJatim.com**



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Mutasi Pejabat Carut-Marut, Komisi A DPRD Sidoarjo Ngamuk

Admin

Tuesday, December 27, 2022 | December 27, 2022 WIB |

192 Views



Rapat Dengar Pendapat Komisi A DPRD Sidoarjo yang membahas pelantikan 202 pejabat daerah.

DNN, SIDOARJO – Komisi A DPRD Sidoarjo menilai mutasi 201 pejabat eselon 2 hingga 4 di lingkungan Pemkab Sidoarjo yang dilakukan beberapa hari lalu sangat carut marut dan penuh kejanggalan.

Diantaranya posisi jabatan baru yang diumumkan petugas protokoler ketika pelantikan yang berbeda dengan isi SK Bupati yang diterima. Misalnya Solichin yang diumumkan menduduki jabatan baru sebagai Camat Tulangan, namun dalam SK-nya justru menempatkannya sebagai Camat Sukodono.

"Kenapa itu kok bisa salah? Ini ada rekamannya lho dan sudah beredar," tandas Ketua Komisi A, Dhamroni Chudlori dengan nada tinggi di forum yang dihadiri Plt Sekda dan juga Plt Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sidoarjo itu.





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Ia juga mempertanyakan tentang adanya pejabat yang tidak ikut dilantik oleh bupati Sidoarjo pada saat itu namun justru menerima surat mutasi. Selain itu dari ratusan pejabat yang dilantik, namun hanya lima orang saja yang posisi jabatan barunya diumumkan oleh petugas protokol.

Menurut Dhamroni, gara-gara kejanggalan tersebut ia mendapatkan banyak pengaduan dari masyarakat. Namun saat hal itu ingin dikonfirmasi, Sekretaris BKD, Zainul Arifin Umar justru sama sekali tak merespon ketika ditelepon. "Saya sudah hubungi anda tujuh kali namun tidak diangkat, dan anda juga tidak telpon balik!" ujarnya geram.

Zainul terlihat begitu gugup saat dicecar pertanyaan terkait kejanggalan-kejanggalan tadi. Pejabat yang masih berusia muda itupun menuding pihak protokol yang salah baca. Namun ketika didesak lagi, Zainul justru memberikan jawaban yang berbeda. "Karena penulisan pak, ya karena penulisan," jawabnya.

Dalih yang dilemparkan Sekretaris BKD Sidoarjo itu kontan membuat Dhamroni dan anggota Komisi A yang hadir di forum tersebut kecewa. "Anda semua dengar sendiri tadi, jawaban dari sekretaris BKD pada setiap pertanyaan yang kami lontarkan, menurut kami semuanya tidak ada yang memuaskan," ucapnya pada wartawan.





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Di akhir pertemuan, Komisi yang membidangi masalah hukum dan pemerintahan itu meminta pada BKD untuk mengirimkan data pejabat yang dilantik kemarin dan juga pos pos jabatan baru yang mereka tempati.

"Komisi A sangat membutuhkan data itu sebagai bahan untuk menjalankan fungsi kami di bidang pengawasan," ungkap legislator PKB itu. Namun sampai berita ini ditayangkan, Dhamroni yang dihubungi melalui selulernya menyatakan belum menerima data yang dimintanya.

Menanggapi hal itu, Plt Kepala BKD Sidoarjo, Imam Mukri menyampaikan permohonan maaf atas carut marutnya mutasi jabatan kemarin. "Selaku pelaksana tugas Kepala Badan Kepegawaian Daerah, saya meminta maaf atas kesalahan yang dilakukan oleh adik-adik saya. Saya juga menyampaikan terima kasih pada komisi A atas atensi yang diberikan pada kami," ungkapnya.

Sementara itu Plt Sekretaris Daerah Sidoarjo, Andjar Surjadianto menyatakan pihaknya akan mencoba menggali lebih dalam tentang permasalahan yang terjadi terkait mutasi jabatan itu. "Tapi kata kuncinya adalah sangat sepakat kalau ini menjadi pembelajaran kita bersama," pungkasnya. (Hans/Pram)



Ketua Paguyupan



DARVANTO/DUTA

H NAWARI Camat Waru, banyak pihak yang terkejut ia dipercaya jadi Camat Waru era Bupati Sidoarjo, Ahmad Muhdlor (Gus Muhdlor).

7 Jabatan Camat Digeser

SIDOARJO - Pelantikan dan mutasi 202 pejabat eselon 2, 3 dan 4 yang dilakukan Bupati Sidoarjo, H. Ahmad Muhdlor, S,IP Jumat (23/12) pekan lalu di Pendapa Delta Wibawa yang sebelumnya masih teka-teka, kini semakin terkuak.

Ketua Paguyupan Camat Kabupaten Sidoarjo, G. Gundari, S.Sos, M.Si membuka jika pengisian jabatan camat eselon 3A ada 7 yang digeser.

Yakni Camat Jabon di isi Basuki (Kasi Pemerintahan) Sedati, Camat Tulangan di isi Prayit sebelumnya di Bappeda, Camat Wonoayu di isi Ribus (Sekcam Tanggulangin), Mantan Camat Wonoayu, Probo Agus Sunarno dikembalikan lagi sebagai Kabid di Dinas (PMD) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Camat Sukodono, Ali Sarbini (digeser penggantinya M. Solichin (sebelumnya menjabat Inspektorat Pembantu IV).

Camat Buduran diisi Rizal (sebelumnya menjabat Sekdin P3KB) dan Wahyu Hidayat Plt Camat Buduran digeser ke Bappeda, Camat Prambon di isi Fery dan Camat Waru diisi H. Nawari (sebelumnya menjabat Kabid PMK (Pemadam Kebakaran) BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah).

Diluar dugaan, H. Nawari dipercaya sebagai Camat Waru di era Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor. Semua pada kaget ketika H. Nawari jabat Camat Waru. Karena sebelumnya, H. Nawari saat di Kabid PMK merupakan jabatan dikotak. Sebelum jabat Kabid PMK, H. Nawari menempati posisi jabatan empuk sebagai Kabid Pasar Rakyat di Disperindag era Bupati Saiful Ilah.

H. Nawari saat dikonfirmasi mengatakan ini merupakan rejeki dan berkah dari Allah SWT. Jabatan ini sebuah amanah yang harus dijalankan. Ia sudah orientasi mengenalkan diri di kantor kecamatan Waru, Senin (26/12).

"Saya sudah orientasi pengenalan dikantor kecamatan. Setelah itu saya akan mengenalkan diri ke kepala desa-kepala desa,"ujarnya.

Ia menjabat Kabid PMK di BPBD Sidoarjo sekitar 1,3 tahun, per SK 27 Juli 2021. ●dar

Baznas Bantu Biaya Hidup 327 Warga Kurang Mampu

Sidoarjo, Bhirawa

Akhir tahun 2022, Baznas Kab Sidoarjo, Selasa (27/12) kemarin, mendistribusikan bantuan biaya hidup untuk sekitar 327 orang warga kurang mampu. Bantuan uang itu, diharapkan bisa membantu ikut meringankan beban biaya hidup.

Ketua Baznas Sidoarjo, M. Chasbil Azis Soju Sodar, mengatakan selama ini pihaknya secara bertahap sudah menyicil membantu masyarakat yang berhak menerima bantuan hidup. "Di akhir tahun 2022 ini, yang masih belum menerima, kita tuntaskan saat ini. Tiap penerima kita bantu Rp500 ribu," kata Chasbil, di sela-sela pendis-

tribusi bantuan biaya hidup, yang dilakukan di pendopo Delta Wibawa Kab Sidoarjo.

Apa program bantuan biaya hidup ini, yang membantu para warga kurang mampu di Kab Sidoarjo, pada tahun 2023 mendatang masih ada? Menurut Ketua Baznas Sidoarjo, periode 2022-2027 itu, masih ada. Karena kegiatan tersebut memang bermanfaat bagi banyak orang. Pada awal tahun 2023 mendatang, lanjut Chasbil, juga ada kegiatan dari Baznas Sidoarjo, yang bisa dinikmati oleh warga kurang mampu di Kab Sidoarjo.

Di antaranya, khitan massal. Quotanya sekitar 400 an anak. Sekitar 200 anak akan dikhitan di pendopo

Kabupaten, dan sekitar 200 anak akan dibagi di 18 kecamatan. Juga akan ada operasi katarak mata dan isbat nikah. Yakni menikahkan orang yang selama ini masih belum mempunyai surat nikah dari KUA, karena terbentur tidak memiliki biaya. "Kami bisa melakukan kegiatan ini, karena tidak lepas dari peranan semua dermawan, pembayar zakat, baik dari pihak swasta, masyarakat maupun ASN Sidoarjo," ujarnya.

Petugas sosial dari Kec Tarik, Wawan, mengatakan di wilayahnya diakui memang banyak warga yang kurang mampu. Karena wilayah Sidoarjo selatan ini, menjadi pemetaan kawasan kantong kemiskin-



alikusyanto/
bhirawa.

Ketua Baznas Sidoarjo, M. Chasbil Azis Soju Sodar, menyerahkan bantuan biaya hidup, kepada warga kurang mampu, di pendopo Delta Wibawa.

nan di Kab Sidoarjo. "Ada 15 orang warga kami, yang mendapat bantuan kali ini," ujarnya.

Mereka diantaranya berasal

dari Desa Kemuning, Kendal-sewu, Kedinding, Singogalih, Margobener dan Balongmacekan. [kus.ca]

HARIAN Bhirawa

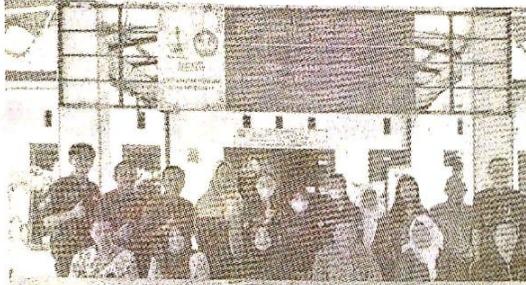
Unipa Ajak Warga Jatikalang Kelola Bank Sampah

Sidoarjo - HARIAN BANGSA

Universitas PGRI Adi Buana (Unipa) Surabaya mengajak warga Desa Jatikalang Kecamatan Krian, Sidoarjo, mengatasi masalah sampah dengan mendirikan bank sampah. Itu dilakukan oleh Tim Dosen Program Studi Teknik Lingkungan Unipa melalui pendanaan insentif pengabdian kepada masyarakat yang terintegrasi MBKM bagi PTS tahun 2022.

Diketahui, pengolahan sampah dengan sistem 4R yang terdiri dari Reduce, Reuse, Recycle, dan Recovery melalui bank sampah, masih belum banyak dilakukan oleh masyarakat, termasuk warga Desa Jatikalang.

"Bank sampah menja-



Tim Unipa Surabaya saat pendampingan terkait bank sampah di Desa Jatikalang, Krian.

di media agar masyarakat dapat melakukan pengolahan sampah dan menghasilkan keuntungan karena sampah yang dihasilkan dapat menjadi rupiah," kata Ketua Tim

Dosen Program Studi Teknik Lingkungan Unipa Surabaya, Sri Widyastuti, Selasa (27/12).

Karena itu, Sri Widyastuti menambahkan, timnya dibantu sejumlah mahasiswa Unipa

mendampingi warga Desa Jatikalang, belajar manajemen organisasi bank sampah. Mulai pengumpulan sampah, penimbangan sampah, pencatatan tabungan sampah di buku bank sampah, hingga pembagian buku tabungan bank sampah.

Pendampingan mengelola bank sampah ini dilakukan selama tiga hari, 14-16 Desember 2022 lalu. Kegiatan belajar mengelola sampah melalui bank sampah ini diikuti oleh 100 warga Desa Jatikalang, Krian. Warga pun antusias karena potensi uang yang dihasilkan dari pengelolaan sampah melalui bank sampah. Sri Widyastuti menambah-

kan, perlu pengetahuan khusus untuk mengolah sampah melalui bank sampah. Misalnya warga harus memilah sampah dari rumah tangga, yakni membedakan sampah organik dan anorganik. Sampah organik seperti sisa nasi dan sayuran bisa dijadikan kompos. Sampah anorganik, seperti botol, kardus, kertas, dan minyak jelantah bisa dijual ke Bank Sampah.

Di kesempatan ini, Ketua Paguyuban Bank Sampah Sidoarjo Mailiya Hurtamud Diyanah mengedukasi masyarakat tentang pentingnya bank sampah sebagai solusi yang tepat untuk menarik partisipasi masyarakat dalam mengurangi pencemaran lingkungan. (sta/rd)



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Jembatan Desa Kraton Akhirnya Tersambung

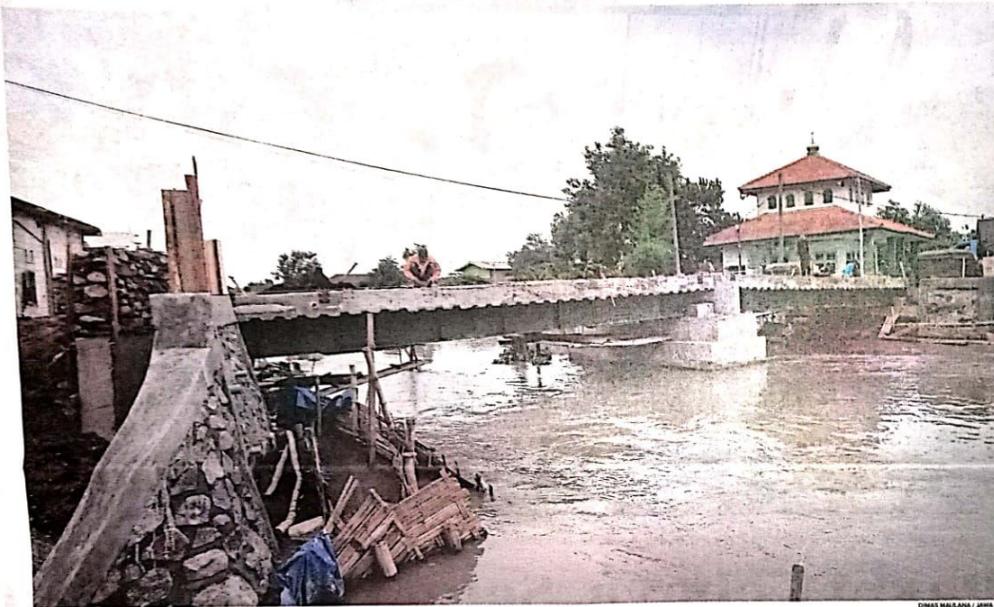
SIDOARJO – Jembatan di Dusun Sidomukti RT 7, RW 2 di atas saluran sekunder Mangetan Kanal Desa Kraton, Kecamatan Krian, akhirnya bisa tersambung. Meskipun, belum tuntas seluruhnya. Kini menyisakan pelapisan aspal dan pemasangan pagar.

Hingga kemarin (27/12), petugas mengebut pekerjaan. Sebab, 31 Desember harus tuntas semuanya. Sisa empat hari ini dioptimalkan untuk menuntaskan fisik jembatan. Misalnya, pembersihan material, pemasangan pagar, pemasangan oprit atau jalan turunan dari jembatan, dan pengaspalan permukaan jembatan.

Kepala Bidang Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga, dan Sumber Daya Air (DPUBMSDA) Rizal Asnan menyebut penuntasan itu tidak membutuhkan waktu lama. Sebab, pekerjaan utamanya seperti fondasi dan pengecoran permukaan hingga jembatan tersambung sudah tuntas. "Artinya, selesai sesuai target," jelas Rizal.

Sebelumnya, pembangunan jembatan sepanjang 25 meter dengan lebar 4 meter itu sempat molor dari jadwal bulanan. Penyebabnya, aliran sungai tinggi sehingga menyulitkan petugas saat membangun fondasi jembatan. Bahkan, Wakil Bupati Sidoarjo Subandi sempat sidak dua kali untuk memastikan proyek tersebut selesai sesuai target.

Rizal meminta, dengan sisa waktu yang ada, kontraktor segera menyelesaikan kekurangannya. Dengan begitu, jembatan bisa segera dicek tim terkait keamanannya dan bisa segera dilewati masyarakat. (uzl/c7/any)



SUDAH MULUS: Kondisi Jembatan Kraton yang tuntas dibangun kemarin. Pengerjaan tinggal pengaspalan dan pemasangan pagar.

Jawa Pos

Men PAN-RB: Pensiun Dini Tak Ada di Revisi UU ASN

JAKARTA – Gonjang-ganjing kabar pensiun dini massal tengah melanda para aparatur sipil negara (ASN). Bahkan, kebijakan itu disebut-sebut bakal disisipkan dalam revisi Undang-Undang 5/2014 tentang ASN (UU ASN).

Dikonfirmasi terkait isu tersebut, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Men PAN-RB) Abdullah Azwar Anas tegas menampikinya. Dia mengatakan, pensiun dini ASN itu tidak ada dalam rancangan undang-undang (RUU) tentang perubahan UU ASN.

Sebagai informasi, revisi UU ASN tersebut masuk Prolegnas Prioritas 2023 dan diputuskan dalam rapat paripurna DPR pada September lalu.

"Jadi, sebenarnya itu *nggak* ada di dalam revisi UU ASN, soal pensiun dini *nggak* ada. Cuma, ini *kan* banyak skenario (manajemen ASN) yang mengusulkan," ujar Anas saat ditemui sesuai rapat menteri terkait penyusunan perpres tentang penguatan pendampingan pembangunan di kantor Kemenko PMK, Jakarta, kemarin (27/12).

Meski begitu, dia mengatakan, banyak usulan skenario soal manajemen ASN yang disampaikan kepadanya. Mengingat, ada ASN yang produktif dan tak jarang yang kurang produktif. Pemerintah pun tidak bisa serta-merta memberhentikan mereka. Beda dengan swasta, yang bisa menawarkan konsep pensiun dini, lalu memberikan pesangon.

"Ini masih ide gagasan dari banyak orang, jadi (pensiun dini, Red) di revisi UU ASN itu belum ada. Kira-kira begitu," tegas mantan bupati Banyuwangi tersebut.

Asisten Deputi Perancangan Jabatan, Perencanaan, dan Pengadaan SDM Aparatur Kementerian PAN-RB Aba Subagja menambahkan, aturan pensiun dini itu sejatinya sudah ada di Peraturan Pemerintah (PP) 11/2017 tentang Manajemen ASN. PNS dapat mengajukan pensiun dini lantaran penataan organisasi atau memang sudah mencukupi syarat yang ditentukan dalam PP tersebut. Jika disebabkan penataan organisasi, PNS dengan sepuluh tahun masa bakti su-

dah diperbolehkan untuk pensiun dini.

"Karena dia *nggak* ada tempat, *kan* organisasinya itu sudah dirampingkan, misalnya. Kemudian, setelah diberi tempat ke sana ke sini *nggak* ada, dia boleh mengajukan pensiun dini," jelasnya.

Beda perkara jika pengajuan oleh ASN sendiri, salah satu syaratnya berusia minimal 50 tahun dengan masa bakti 20 tahun. Ketentuan itu wajib dipenuhi guna memastikan manfaat pensiunnya bisa diperoleh maksimal. (mia/wan/c7/jun)

Jawa Pos



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Setiap Bulan 10 Orang Ajukan Pembatalan Haji di Kemenag

KOTA-Jamaah yang membatalkan haji tahun ini cukup banyak. Menurut data di Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Sidoarjo, setiap bulan paling tidak ada 10 orang yang mengajukan pembatalan. Kemenag pun mengimbau agar jamaah tidak tergesa-gesa membatalkan porsi haji.

Kepala Kemenag Sidoarjo Arwani mengatakan, setiap tahun yang namanya pembatalan porsi haji selalu ada. Namun untuk tahun ini, jumlahnya cukup meningkat jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Diakuinya, pembatalan porsi haji memang menjadi hak setiap jamaah yang sudah mendapatkan porsi. Ketika ditanya penyebab pembatalan, ada beragam alasan yang dilontarkan jamaah.

● Ke Halaman 10



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Setiap Bulan 10 Orang...

Biasanya, karena CJH sudah tua dan mempunyai penyakit kronis. Sehingga diperkirakan tidak mungkin menempuh rukun haji.

Selain itu, juga karena alasan waktu tunggu terlalu lama. Saat ini antrean pemberangkatan haji di Sidoarjo sudah mencapai 34 tahun.

"Apalagi melihat haji tahun ini yang kuota pemberangkatannya hanya separo, akhirnya banyak yang pesimis," kata Arwani.

Karena panjangnya waktu tersebut, jamaah akhirnya memilih menarik biaya pendaftaran haji kemudian digunakan untuk biaya umrah.

Padahal ketika porsi haji diba-

talkan dan diganti umrah, ibadah sunah tersebut tidak dapat mengugurkan kewajiban haji.

Untuk meyakinkan para jamaah, Kemenag terus melakukan sosialisasi. Dalam sosialisasi itu, pihaknya meminta para jamaah untuk berpikir panjang dan menjadikan momen menunggu sebagai waktu untuk mempersiapkan diri dan

mendalami agama.

Sehingga ketika sudah masuk dalam porsi pemberangkatan, jamaah sudah siap.

"Sebab ibadah haji ini kewajiban bagi umat muslim yang mampu, sehingga ada baiknya dipikir panjang dulu sebelum memutuskan untuk melakukan pembatalan porsi haji," pungkasnya. (nis/vga)



Oknum Dinas Diduga Kongkalikong Proyek dengan Kontraktor



Kantor PUBMSDA Sidoarjo.

Sidoarjo, Memorandum

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo setiap tahun selalu memprioritaskan pembangunan infrastruktur dengan menggunakan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD).

Namun, kadang proyek yang dikerjakan pengusaha jasa konstruksi (kontraktor) masih sering melanggar aturan spesifikasi teknis karena diduga ada permainan dengan oknum dinas setempat.

Sebagai proyek penunjang langsung (PL) misalnya. Banyak proyek PL di Dinas PUBMSDA Kabupaten

Sidoarjo yang diduga di-monopoli oleh kontraktor tertentu.

Pantauan wartawan koran ini di lapangan, pengerjaan proyek PL dinas itu diborong salah satu kontraktor yang dikenal sebagai tangan kanan oknum pejabat PUBMSDA. Ia dapat proyek banyak karena kedekatannya dengan oknum

pejabat dinas setempat.

Oknum pejabat yang diduga bermain dengan salah satu rekanan saat dikonfirmasi enggan berkomentar.

"Bersurat saja ke kantor, biar saya dapat disposisi dan petunjuk dari pimpinan," ujar R kepada wartawan, kemarin.

Sementara itu, Kepala Dinas PUBMSDA Dwi Eko Saptono saat dikonfirmasi masalah ini via ponselnya tidak memberi jawaban.

Tak sampai disitu, wartawan koran ini berusaha mendatangi kepala dinas dengan datang ke kantor

dan ditemui oleh staf.

"Bapak tidak ada di tempat," ujar salah satu staf.

Hingga berita ini dituliskan belum ada penjelasan dari kepala dinas soal kabar salah satu bawahannya diduga bermain dengan kontraktor. (yud/kri/jok/mik)

MEMORANDUM
BEKERJA DAN MEMBELA TANAH AIR



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Praktik Pungli Marak, LSM Satria Minta Warga Tak Takut Lapor Polisi

Sidoarjo, Memorandum

Ketua LSM Satria Makin Suganda menyoroti maraknya pungutan liar (pungli) yang diduga dilakukan oleh para oknum di Sidoarjo dengan dalih uang keamanan. Seperti beberapa hari lalu, kasus seperti ini terjadi di Sidoarjo.

"Nggak ada itu uang keamanan. Yang ngamanin itu polisi. Laporkan biar ditangkap polis," kata Makin Suganda, Selasa (27/12).

Ia sudah sering menyampaikan kepada setiap kepala lingkungan (kepling) untuk tidak memberi uang kepada oknum. Oknum yang menarik pungli itu bukan aparat.

"Sudah kita sampaikan terus itu. Tidak ada uang keamanan proyek dan sebagainya," tegasnya.

Sehingga ketika ada organisasi atau siapa pun yang meminta uang dengan alasan keamanan, Makin menyebut hal itu merupakan praktik pungli.

"Kalau ada organisasi atau segala macam bentuknya yang meminta uang dalam alasan uang keamanan, itu pungli," urainya.

Bila ada yang melakukan pungli, Makin meminta agar warga segera melaporkan hal tersebut kepada LSM Satria melalui surat maupun datang langsung ke kantornya.

Dia meminta warga untuk tidak takut untuk membuat laporan. Atau silakan lapor ke kepolisian langsung. Polisi pasti akan menindak tegas.

"Silahkan laporkan saja, baik ke saya maupun anggota. Kami siap melayani masyarakat untuk melapor ke aparat penegak hukum. Biar disikat

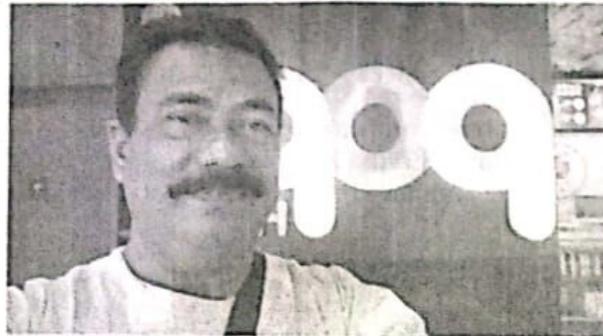


FOTO: MEMORANDUM/YUD

Makin Suganda

oleh aparat penegak hukum. Atau monggo lapor polisi. Biar ditindak polisi," tandasnya. (yud/jok/mik)

MEMORANDUM

BEKERJA DAN MEMBELA TANAH AIR



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO



SEJAHTERA: Pekerja di salah satu industri yang ada di Sidoarjo.

Perlu Ciptakan Iklim Kondusif Hubungan Perusahaan dan Pekerja

KOTA-Demi mewujudkan kesejahteraan tenaga kerja yang ada di Sidoarjo, tahun depan akan dibentuk rancangan peraturan daerah (ra-perda). Isinya tentang penyelenggaraan ketenagakerjaan. Perda yang diusulkan oleh Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) tersebut akan dibahas bersama panitia khusus.

Anggota Komisi D DPRD Sidoarjo Aditya Nindyatman mengatakan, masalah ketenagakerjaan memang masih menjadi fokus perhatian tahun depan. Hubungan industrial antara perusahaan dan pekerja perlu dibahas secara sinergi. Hal itu supaya

iklim investasi daerah tetap terjaga.

Menurut dia, ketika pekerja merasa nyaman di perusahaan tersebut, maka dapat meningkatkan kinerjanya. Sebaliknya, jika perusahaan nyaman dengan pekerja, maka bisa menarik perusahaan lainnya. Dengan begitu bisa meningkatkan investasi.

Ke depan, pihaknya perlu mengetahui tentang data pekerja di Kota Delta. Data itu nantinya penting untuk penguatan draf raperda penyelenggaraan ketenagakerjaan.

"Adanya raperda itu diharapkan agar ada perlindungan bagi pekerja mandiri, pekerja rentan,

dan usaha kecil seperti pedagang kaki lima, kios dan usaha mikro kecil lainnya," ujarnya.

Termasuk memperhatikan apakah perusahaan sudah menerapkan aturan. Pihaknya tidak ingin sampai ditemukan adanya pelanggaran. Termasuk perusahaan yang mempekerjakan pekerja di bawah umur.

Hingga saat ini, diakuinya Pemkab Sidoarjo sudah berusaha membuat pekerja bisa sejahtera. Seperti mendorong perusahaan besar agar dapat memberi insentif atau tambahan penghasilan serta fasilitas-fasilitas. (nis/vga)

